

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bambang Saputra
STIE Madani Balikpapan

Mahmudi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
e-mail: mahmudi@uii.ac.id

Abstract

This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth and social welfare. Research sample are regencies/municipalities by province in Indonesia except DKI Jakarta, employing secondary data from Indonesia Central Bureau of Statistic within the period of 2005 up to 2008. Data analysis is conducted by using path analysis with AMOS program software. The results of this study indicate that, first, fiscal decentralization has a negative and significant effect on economic growth. Second, economic growth has a positive and significant effect on social welfare. Third, fiscal decentralization has a positive and significant effect on social welfare.

Keywords: *fiscal decentralization, economic growth, social welfare, local government.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, dengan menggunakan data sekunder dari Biro Pusat Statistik Indonesia periode 2005 sampai dengan 2008. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur dengan program AMOS. Hasil analisis mengindikasikan bahwa, pertama, desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang desentralisasi mencakup banyak isu. Dalam kaitannya dengan manajemen makroekonomi, menurut Simanjuntak (2010), isu-isu kunci yang menonjol adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik. Sebagian ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sebagian lain meyakini bahwa desentralisasi mungkin dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya

cenderung menyulitkan manajemen makroekonomi, memperlambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakmerataan dan ketimpangan, serta memperburuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan bersifat ambiguitas itu tak lepas dari ciri desentralisasi fiskal yang multidimensi.

Isu desentralisasi fiskal sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian banyak ahli, seperti Oates (1993); Bird (1993); Bird, Ebel, dan Wallich (1995); Martnez dan McNab (2001); World Bank (1997a); Bahl dan Linh (1992); dan Gramlich (1993). Mereka menyatakan bahwa

dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dengan tegas dijelaskan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Prud'homme (1995), Peterson (1996), Zang dan Zao (1995) dalam penelitiannya di Amerika Serikat, Phillips dan Woller (1997) dan Davodi dan Zao (1998) untuk kasus di negara maju, Zang dan Zao (2001) dalam penelitiannya di India, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008).

Namun demikian, World Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001) mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitasi. Kemudian juga dengan tegas mengenai pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa penelitian di antaranya, Phillips dan Woller (1997) dan Davodi dan Zao (1998) untuk kasus di negara-negara berkembang, serta Zang dan Zao (2001) dalam penelitiannya di China. Di Indonesia hal ini juga konsisten dengan penelitian Swasono (dalam Simanjuntak, 2010).

Dalam kaitannya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lindahman dan Thurmaier (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat). Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dikaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penggabungan dua isu ekonomi-sosial desentralisasi fiskal di atas, untuk kasus di Indonesia. Kendatipun perdebatan dan manfaat dari desentralisasi fiskal di Indonesia masih terus berlangsung yang cenderung ambigu membawa kita pada sejumlah pertanyaan. Sudah tepatkah proses desentralisasi di Indonesia? Apakah kita sudah *on the right track*? Kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia akan memberi manfaat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa studi menyoroti pengalaman negara-negara tertentu dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (lihat Bird dan Vaillancourt, 2000). Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literatur teoritik dan empirik.

Penelitian Oates (1993), Martinez dan McNab (2001) menghasilkan, desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara

efisien daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif (Martinez dan McNab, 2001).

Sejalan juga dengan penelitian tersebut, penelitian Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Bahl dan Linh (1992), Gramlich (1993), dan Zang dan Zou (1998) berargumen bahwa desentralisasi penerimaan dan pengeluaran merupakan jalan untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan daerah daripada pemerintah pusat. Hal yang senada juga dihasilkan pada penelitian Prud'homme (1995) dan Peterson (1996) yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah di masa mendatang. Martinez dan McNab (2001) melakukan kajian literatur dan berargumen bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi ekonomi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Aschaur (1989) dan Barro (1990).

Zhang dan Zao (2001), meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat *provincial* yang diaplikasikan di China dan India dan menyimpulkan bahwa terdapat hasil negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di China, sedangkan untuk India, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Zhang dan Zou (1998), juga menemukan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah China dalam 15 tahun terakhir.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Davodi dan Zao (1998), Phillips dan Woller (1997), menyimpulkan dengan tegas bahwa terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk kasus di negara-negara berkembang, sedangkan untuk kasus negara maju menunjukkan hasil sebaliknya di mana terdapat pengaruh positif. Davodi dan Zou (1995), menemukan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh Philips dan Woller (1997), menemukan hal yang berbeda bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kasus negara-negara maju, sementara itu untuk negara-negara sedang berkembang mereka gagal untuk menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut World Bank (1997b), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Ada tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu dirasakan. Pendapat ini didasari karena kelemahan di negara berkembang tidak memberikan intensif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituenya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

World Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001), kemudian juga mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab

desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitas.

Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Brodjonegoro (2006), misalnya, menegaskan bahwa dalam lima tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal, sulit untuk disimpulkan apakah desentralisasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah, selama periode tersebut, terjadi pemulihan ekonomi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stabilitas makroekonomi nasional. Indikasi lain yang terlihat cukup jelas adalah bahwa kawasan Indonesia Bagian Barat (IBB) tumbuh lebih cepat dibanding Indonesia Bagian Timur (IBT), meski perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan tercepat. Juga ada indikasi kesenjangan fiskal antardaerah memasuki era desentralisasi tampak kian memburuk, meski ini sudah dicoba dinetralkan dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian Swasono (dalam Simanjuntak, 2010) yang mengaitkan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah juga menemukan fakta menarik. Menurutnya, desentralisasi penerimaan ternyata cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut mencakup periode 15 tahun ini, yakni 10 tahun sebelum pelaksanaan dan 5 tahun di dalam era desentralisasi, cukup valid untuk mengukur *ex post-impact*. Dia menambahkan bahwa karena desentralisasi itu sesuatu yang dinamis, maka 10 tahun ke depan dampaknya bisa sangat berbeda. Selain itu, desentralisasi menyangkut banyak aspek yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda untuk mendukung dampak positifnya.

Berbeda dengan Brodjonegoro (2006) dan Penelitian Swasono (dalam Simanjuntak, 2010), penelitian Wibowo (2008) dengan menggunakan estimasi panel *fixed effect*, hasil penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pem-

angunan daerah selama periode 1999-2004. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. Hal ini kemudian juga diperkuat oleh pendapat Simanjuntak (2010) yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Pada penelitian ini justifikasi yang peneliti ambil adalah bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi dan efektifitas ekonomi serta secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam artian desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian diantaranya: Aschaur (1989), Barro (1990), Bahl dan Linh (1992), Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Oates (1993), Gramlich (1993), Prud'homme (1995), Peterson (1996), World Bank (1997b), Zang da Zou (1998), Bird dan Vaillancourt (2000), Martinez dan McNab (2001), serta penelitian di Indonesia seperti penelitian Wibowo (2008) dan Simanjuntak (2010) memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dirumuskanlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, menurut Boediono (2009: 29), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan

masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogoti oleh keanikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi besama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung dengan hipotesis “*trickle down effect*” (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada “*growth paradigm*” yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) (lihat Kuncoro, 2004: 116). Bhalla (1994) membawa perspektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. Menurut Kuncoro (2004: 117) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis “*trickle down effect*” terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

Dalam perspektif makro ekonomi hubungan tersebut dijelaskan oleh Mankiw (2007: 536-537) dengan menyatakan bahwa, “Dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya.” Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak

penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet.

Berbeda dengan hipotesis “*trickle down effect*”, Barro (1991) menemukan hubungan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori “*human capital*”. Dengan menyusun hubungan tersebut, Barro (1991) menolak hipotesis “*trickle down effect*” yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic needs*. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi, dan sebagainya.

Di Indonesia, penelitian yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hira-wan (2007) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah. Di

bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah di setiap daerah telah meningkatkan tingkat pendaftaran (*enrollment rate*) cukup tinggi. Berbagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara riil untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100%. Juga Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
 H3: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan *hypotheses testing*, yang bertujuan menguji model hipotetik.

Populasi, Sampel, dan Data Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sampelnya adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta. Pengecualian tersebut dilakukan karena wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta bukan merupakan daerah otonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta sudah tercakup dalam daftar keuangan pemerintah provinsi.

Data penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan bentuk *pooled data* pada periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, yaitu:

- a. Data realisasi pendapatan dan pengeluaran (APBD) kabupaten/kota berdasarkan provinsi;
- b. Data pertumbuhan ekonomi provinsi; dan
- c. Data kesejahteraan masyarakat yang menggunakan proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi.

Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Desentralisasi Fiskal

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah provinsi dalam satuan persen. Penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi (2001), Halim (2004: 27-28), dan Mursinto (2004:170) dalam Sasana (2009).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen.

Kesejahteraan Masyarakat

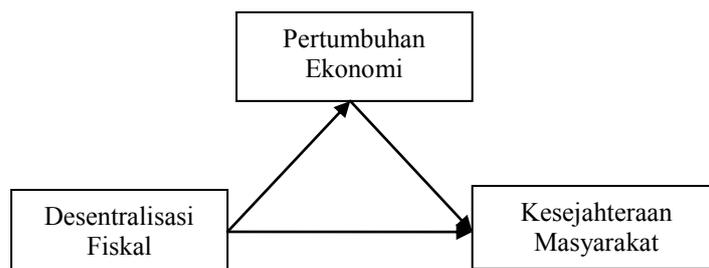
Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang dikembangkan sebagai model penelitian untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y1 &= \beta1 X1 + e \dots\dots\dots (1) \\
 Y2a &= \beta2 Y1 + e \dots\dots\dots (2) \\
 Y2b &= \beta3 X1 + e \dots\dots\dots (3) \\
 Y2c &= \beta4 X1 + \gamma1 Y1+ e \dots\dots\dots (4)
 \end{aligned}$$

dimana:
 X1 adalah desentralisasi fiskal
 Y1 adalah pertumbuhan ekonomi
 Y2 adalah kesejahteraan masyarakat
 e adalah *disturbance term*



Gambar 1: Model Penelitian

Metode Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software AMOS*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Outlier

Uji Normalitas

Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan Analisis Jalur. Pengujian normalitas ditekankan pada data multivariat dengan melihat nilai skewness, kurtosis, dan secara statistik dapat dilihat dari nilai Critical Rasio (CR). Jika digunakan tingkat signifikansi sebesar 1 persen, maka nilai CR yang berada di antara -2,58 sampai dengan 2,58 ($-2,58 \leq CR \leq 2,58$) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Hasil secara lengkap mengenai pengujian normalitas data pada seluruh variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran. Pada Lampiran, nilai CR multivariat sebesar 4,012 dan nilai ini tidak terletak di dalam range antara -2,58 sampai dengan 2,58 (sedikit di atas 2,58). Jadi secara multivariate berdistribusi tidak normal.¹

¹ Namun, multivariate berdistribusi tidak normal pada penelitian ini tidak menjadi persoalan besar berdasarkan *central limit theorem* (CLT), yang memberikan justifikasi secara teori atas asumsi kenormalan. CLT menyatakan apabila X_1, X_2, \dots, X_n merupakan variabel acak dari populasi (dalam hal ini, distribusi probabilitas) manapun dengan rata-rata μ_x dan varians σ_x^2 , maka rata-rata sampel \bar{X} cenderung didistribusikan secara normal dengan rata-rata μ_x dan varians $\frac{\sigma_x^2}{n}$ ketika ukuran sampel naik tak terhingga. Dalam prakteknya, tak peduli distribusi probabilitas apapun yang mendasarinya, rata-rata sampel yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 observasi akan mendekati normal (pada penelitian ini terdapat 113 observasi). (lihat Gujarati, 2006: 76-77).

Uji multikolinearitas atau Singularitas

Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matriks kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian. Hasil penelitian memberikan nilai *determinant of sample covariance matrix* sebesar 696,640. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.

Outlier

Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara univariate maupun multivariate, yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh dari observasi-observasi yang lainnya. Apabila terjadi *outlier* dapat dilakukan *treatment* khusus pada *outlier* nya asal diketahui bagaimana munculnya outlier tersebut. Hasil uji *outlier* pada penelitian ini disajikan pada *mahalanobis distance* atau *mahalanobis dsquared*. Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel, oleh karena itu semua kasus yang mempunyai *mahalanobis distance* yang lebih besar dari $\chi^2(3, 0.001) = 25,13$ adalah *multivariate outliers*. Berdasarkan hasil output *mahalanobis distance* dari program AMOS oleh karena nilai *mahalanobis* tidak ada yang di atas 25,13 maka dapat disimpulkan tidak ada *outlier* pada data.

Hasil Estimasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengujian koefisien jalur secara rinci disajikan pada tabel 1. Sedangkan hasil peng-

ujian model lengkap di atas dengan program AMOS secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa 8 kriteria yang digunakan untuk menilai layak/tidaknya suatu model ternyata 4 kriteria terpenuhi, sedangkan 4 kriteria lainnya tidak bisa disajikan dalam hasil pengolahan data. Dengan demikian tidak perlu dilakukan modifikasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa model dapat diterima, yang berarti ada kesesuaian antara model dengan data.

Pengaruh Antarvariabel Penelitian

Pengaruh Langsung Antarvariabel Penelitian

Hubungan langsung terjadi antara variabel eksogen (Desentralisasi Fiskal (X1)) dengan variabel endogen penengah (Pertumbuhan Ekonomi (Y1)), dan variabel endogen (Kesejahteraan Masyarakat (Y2)). Tabel 3 menyajikan hasil *standardized direct* mengenai hubungan langsung yang terjadi di antara variabel-variabel *observed* eksogen dan endogen: Dari tabel 3, dapat dijelaskan besar pengaruh langsung (*standardized direct effects*) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Pengaruh langsung terbesar antara pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) (0,228), selanjutnya antara desentralisasi fiskal (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (0,223). Sedangkan pengaruh desentralisasi fiskal (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) adalah sebesar -0,200.

Pengaruh Tidak Langsung Antarvariabel Penelitian

Hubungan tidak langsung terjadi antarvariabel eksogen (Desentralisasi Fiskal) dengan variabel endogen penengah (Pertumbuhan Ekonomi) dan variabel endogen (Kesejahteraan Masyarakat). tabel 4 menyajikan hasil *standardized indirect* mengenai hubungan tidak langsung yang terjadi di antara variabel-variabel eksogen dan endogen: Dari tabel 4, dapat dijelaskan besar pengaruh tidak langsung (*indirect effects*) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Efek tidak langsung adalah desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu sebesar -0,046.

Tabel 1: Hasil Pengujian Koefisien Jalur

Variabel	Koefisien	C.R.	Prob.	Keterangan
Desentralisasi Fiskal (X1) → Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	-0,200	-2,155	0,031	Signifikan
Desentralisasi Fiskal (X1) → Kesejahteraan Masyarakat (Y2)	0,223	2,418	0,016	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Y1) → Kesejahteraan Masyarakat (Y3)	0,228	2,473	0,013	Signifikan

Sumber: Lampiran diolah

Tabel 2: Hasil Perhitungan Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen

Kriteria	Nilai Cut-Off	Hasil Perhitungan	Keterangan
Chi – Square	Diharapkan kecil	0,000	Baik
Probabilitas	≥ 0,05	-	-
RMSEA	≤ 0,08	-	-
GFI	≥ 0,90	1,000	Baik
AGFI	≥ 0,90	-	-
CMIN/DF	≤ 2,00	0,000	Baik
TLI	≥ 0,95	-	-
CFI	≥ 0,95	1,000	Baik

Tabel 3: Pengaruh Langsung Antarvariabel Penelitian

Pengaruh Langsung	Variabel	Variabel Endogen	
		Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	Kesejahteraan Masyarakat (Y2)
Eksogen	Desentralisasi Fiskal (X1)	-0,200	0,223
	Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	0,000	0,228

Tabel 4: Pengaruh Tidak Langsung Variabel Penelitian

Pengaruh Tidak Langsung		Variabel Endogen	
		Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	Kesejahteraan Masyarakat (Y2)
Variabel	Desentralisasi Fiskal (X1)	0,000	-0,046
Eksogen	Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	0,000	0,000

Pengaruh Total Antarvariabel Penelitian

Tabel 5: Pengaruh Total Variabel Penelitian

Pengaruh Total		Variabel Endogen	
		Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	Kesejahteraan Masyarakat (Y2)
Variabel	Desentralisasi Fiskal (X1)	-0,200	0,178
Eksogen	Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	0,000	0,228

Pengaruh total merupakan penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel, yaitu variabel dan variabel endogen. Tabel 5 menyajikan hasil *standardized total effect* yang terjadi di antara variabel- variabel observed eksogen dan endogen. Dari Tabel 5, dapat dijelaskan variabel eksogen (desentralisasi fiskal) melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan total efek 0,178. Efek total terbesar pada variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat (0,228), sedangkan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,200.

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif (-0,200) terhadap pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi” tidak dapat diterima. Hasil studi ini tidak mendukung temuan empiris diantaranya Aschaur (1989), Barro (1990), Bahl dan Linh (1992),

Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Oates (1993), Gramlich (1993), Prud’homme (1995), Peterson (1996), World Bank (1997b), Zang da Zou (1998), Bird dan Vaillancourt (2000), Martinez dan McNab (2001), serta penelitian di Indonesia seperti penelitian Wibowo (2008) dan Siamanjuntak (2010).

Namun, berdasarkan pembahasan tinjauan pustaka dan kerangka teori sebelumnya, hasil studi ini mendukung temuan empiris diantaranya: Phillips dan Woller (1997), Davodi dan Zao (1998), yang menyimpulkan dengan tegas bahwa terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk kasus di negara-negara berkembang; World Bank (1997b) dalam argumentasinya yang kedua menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi; Zhang dan Zao (1998), yang menemukan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah di China dalam 15 tahun terakhir; dan Zhang dan Zao (2001), menyimpulkan bahwa terdapat hasil negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi; serta penelitian di Indonesia oleh Swasono (dalam Siamanjuntak, 2010), menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Bank (1997b) dalam argumentasi kedua dan ketiga. Argumentasi kedua,

bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu dirasakan. Pendapatan ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan intensif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

Alasan lemahnya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sehingga menyebabkan pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut pe-

nulis sebagaimana juga dijelaskan oleh Simanjuntak (2010) dapat dipahami oleh komposisi belanja APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota pada tabel 6.

Pada tabel 6 tersebut menyajikan total APBD, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2005-2008, dirinci berdasarkan empat jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lainnya. Dengan asumsi belanja yang terkait langsung dengan perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal, maka gambaran yang diberikan oleh tabel tersebut dapat memberikan penjelasan. Dalam periode empat tahun terakhir (2005-2008) era desentralisasi fiskal, rata-rata belanja modal tidak mencapai sepertiga dari keseluruhan pengeluaran daerah (23,8%). Jumlahnya jauh di bawah Belanja Pegawai yang berada di urutan pertama (38%).

Selain itu, banyak sekali APBD yang mengalami surplus terutama dalam empat tahun terakhir (2004-2007), sebagaimana dijelaskan pada tabel 7.

Tabel 6: Perbandingan Jenis Belanja APBD Seluruh Daerah di Indonesia, 2005-2008

Belanja	2005		2006		2007*		2008*	
	Miliar Rp	%						
Pegawai	85.626,20	41,8	81.860,95	32,3	130.487,67	38,5	153.396,26	39,4
Barang	45.222,90	22,0	79.050,75	31,2	61.204,19	18,0	72.303,53	18,6
Modal	45.483,46	14,0	54.798,85	21,6	104.747,23	30,9	111.852,75	28,7
Lainnya**	28.690,43	14,0	37.855,34	14,9	42.904,42	12,6	51.825,29	13,3
Total	205.022,99	100	253.565,90	100	339.343,51	100	389.377,83	100

Catatan: * = anggaran; ** = bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, tak terduga, dan lain-lain.

Sumber: Nota Keuangan APBN, 2009

Tabel 7: Jumlah Daerah dengan Surplus/Defisit Anggaran dan Nilainya, 2004-2007

	2004		2005		2006		2007**	
	Surplus	Defisit	Surplus	Defisit	Surplus	Defisit	Surplus	Defisit
Jml Kab/Kota	206	112	282	49	341	34	373	44
(Nilai Rp. T)	(4,493)	(1,242)	(11,256)	(0,424)	(21,992)	(0,936)	(34,043)	(1,006)
Jml Provinsi	24	3	29	2	21	5	26	5
(Nilai Rp. T)	(2,830)	(0,153)	(7,705)	(0,005)	(5,031)	(1,330)	(8,864)	(1,699)
Total Daerah	230	115	311	51	362	99	399	49
(Nilai Rp. T)	(7,323)	(1,395)	(18,961)	(0,429)	(27,023)	(2,266)	(43,007)	(2,705)
Nasional								
APBN*								
(Nilai Rp. T)		(23,807)		(17,778)		(30,441)		(61,927)

Catatan: * tidak semua daerah, sehubungan kelengkapan data; ** diperoleh dari rencana anggaran

Sumber: Nota Keuangan APBN dan RAPBN 2007, 2008, 2009

Hal ini tentu merupakan gejala kurang baik, karena mencerminkan kurang memadainya perencanaan anggaran dan rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan anggaran dalam hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ironisnya jika mentelaah tabel 7 tersebut, tatkala sebagian besar pemerintah daerah surplus, terutama karena kurang mampu melakukan pembelanjaan yang efektif, pemerintah pusat mengalami defisit dan mesti berupaya keras “menambal” setiap tahun dengan berutang ke dalam dan luar negeri.

Kemudian jika dilihat dari perspektif makroekonomi, terutama pengaruh eksternal ekonomi global, pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikarenakan oleh krisis keuangan global pada tahun 2007. Krisis keuangan global telah memberikan tantangan yang luar biasa bagi Indonesia. Keberadaan krisis keuangan global tersebut telah menuntut kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya dalam mempertahankan dan menangkap *Foreign Direct Investment* (FDI) yang semakin terbatas, juga dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan kegiatan ekonomi lokal. Krisis keuangan global akan berdampak pada penarikan dana dari perusahaan mereka yang terdaftar di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. *Capital outflow* ini berdampak pada kecenderungan meningkatnya suku bunga. Dari sisi keseimbangan valas, penurunan penawaran dolar ini menyebabkan harga dolar naik dan membawa tekanan depresiatif terhadap Rupiah di Indonesia. Ini tercermin pada dinamika keseimbangan eksternal. Dalam proses selanjutnya, dampak *shock* akan tersalurkan ke proses aktivitas setiap sektor pada masing-masing perekonomian daerah. (lihat Parewangi, 2009 serta Prasmuko dan Anugerah, 2010)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (0,223) terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan

bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan “pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat” dapat diterima. Hasil estimasi ini didukung oleh data, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM.

Hasil studi ini mendukung hipotesis “*trickle down effect*” (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada “*growth paradigm*” yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat, Bhalla (1994) yang menghubungkan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan Mankiw (2007: 536-537). Senada sebagaimana yang disampaikan Boediono (2009: 29):

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat kita upayakan meningkat tidak tergrogoti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil ini menimbulkan pertanyaan menarik, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB), untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? Dalam perspektif makroekonomi, hal tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi determinan PDB jangka panjang. Dalam jangka panjang, PDB bergantung pada faktor-faktor produksi yang penting, yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi meningkat ketika faktor-faktor produksi tersebut meningkat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan berbagai kebijakan dengan meningkatkan kapabilitas produktif perekonomian tersebut, misalnya kebijakan yang

meningkatkan tabungan nasional atau daerah (baik melalui tabungan publik dan swasta) untuk menghasilkan persediaan modal yang lebih besar; kebijakan peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja; serta kebijakan untuk terbuka dan memanfaatkan seoptimal mungkin kemajuan teknologi untuk penggunaan modal dan tenaga kerja yang lebih produktif. Kemudian kebijakan lain yang tidak kalah penting yaitu peningkatan kualitas institusi nasional atau daerah untuk dapat memberantas korupsi, meningkatkan akumulasi modal yang lebih besar, dan penggunaan sumber daya perekonomian yang lebih efisien.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif (0,228) terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat” dapat diterima. Hasil studi ini mendukung teori *fiscal federalism* dan temuan empiris diantaranya Lindahman dan Thurmaier (2002), serta penelitian yang dilakukan di Indonesia seperti Soesilowati, *ed.* (2005), Hirawan (2007) dan Simanjuntak (2010). Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi Pemerintah Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) sehingga *service delivery* semakin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat; dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut telah cukup menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia *on the right track*. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan suatu hal yang menggembirakan sebab desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam periode empat tahun terakhir (2005-2008) era desentralisasi fiskal, rata-rata Belanja Modal tidak mencapai sepertiga dari keseluruhan pengeluaran daerah. Selain itu, banyak sekali APBD yang mengalami surplus terutama dalam empat tahun terakhir (2004-2007), yang menandakan lemahnya perencanaan APBD. Serta secara makroekonomi, dapat dikarenakan oleh kondisi ekonomi global yaitu krisis keuangan global pada tahun 2007.

Berdasarkan hasil simpulan tersebut, implikasi yang dapat diperoleh adalah perlunya reevaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam era desentralisasi ini (sebagaimana juga telah disampaikan Fauzi (2010))² dengan prinsip “efektifitas dan efisiensi” tidak lagi “luas, nyata, dan bertanggungjawab,” dalam artian

² Menteri Dalam Negeri (2009-2014), Gamawan Fauzi menjelaskan dalam dialog pada majalah Prisma (Vol. 29, Juli 2010), bahwa penyerahan kewenangan tidak lagi berprinsip “luas, nyata, dan bertanggungjawab”, tetapi efektif dan efisien. ... Jadi, UU No. 32/ 2004 akan direvisi dan dimodifikasi dengan pendekatan efisiensi dan efektifitas.

bahwa penyelenggaraan desentralisasi bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu berdasarkan hasil pembahasan di atas dalam jangka pendek untuk memastikan adanya pengaruh positif desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan efisiensi pengeluaran daerah yang berkaitan dengan Belanja Pegawai dan mengefektifkannya untuk Belanja Modal.³ Atau dengan kata lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus lebih serius mengupayakan bagaimana agar pola belanja daerah bisa efektif dalam mendorong perekonomian daerah. Hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah optimalisasi perencanaan APBD dan menghindari keterlambatan penyusunan APBD yang sering terjadi untuk percepatan bergulirnya roda perekonomian daerah.

Kemudian untuk jangka panjang, dikarenakan desentralisasi merupakan fenomena multidimensi dan *multifaceted* (banyak segi), maka desain dan perencanaan dari langkah-langkah pelaksanaannya harus ada dan dibuat secara cermat. Terutama untuk Indonesia yang telah satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi. Perlu ada semacam *grand design* yang harus diacu oleh para pemangku kepentingan dalam setiap langkah dan tindakan. Menurut Simanjuntak (2010), kita tidak boleh menganggap desentralisasi di Indonesia sudah akan selesai dengan keluarnya PP No. 38/2007, dan sedang direvisinya UU No. 32 dan (menyusul) UU No. 33. Dari kacamata pembangunan ekonomi, pekerjaan yang lebih penting masih menanti, yakni bagaimana mengupayakan Pemerintah Daerah yang sudah lebih mandiri

itu mampu menyejahterakan sekaligus menjamin hak-hak politik masyarakat lokal. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kemudian mentransformasikannya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru yang akan memperbaiki pendapatan masyarakat merupakan tugas pokok pemerintah daerah di Indonesia. Ini berarti, di masa depan, perlu dilakukan desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*) sebagai langkah lanjutan desentralisasi fiskal (Simanjuntak, 2010).

Untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan indikator politik, dan/atau menambahkan indikator sosial-ekonominya. Sebagai contoh indikator politik dapat menggunakan tingkat partisipasi politik masyarakat dan indek persepsi korupsi (IPK), indikator sosial dapat menggunakan indek kemiskinan dan indek pelayanan publik; dan indikator ekonomi dapat menggunakan pertumbuhan APBD dan PDRB Per Kapita. Kemudian dapat juga diteliti berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu baik secara global maupun nasional, sebagai contoh pada saat krisis keuangan global dan pemilihan umum.

DAFTAR REFERENSI

- Aschaur, D. (1998). Is public expenditure productive. *Journal of Monetary Economics*, 23, hal. 177-200.
- Bahl, R. W. & Linh, J. (1992). *Urban finance in development countries*. New York: Oxford University Press.
- Barro, R. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economics*, 98, hal. 103-125.
- Barro, R. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Academic*, hal. 407-443.
- Bhalla, S. (1994). Freedom and economic growth: A virtuous circle. *Nobel Symposium Democracy's Victory and Crisis*. Uppsala University.
- Bird, R. M. (1993). Threading the fiscal labyrinth: some issues in fiscal decentrali-

³ Misalnya, Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya akan menciptakan suatu lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menampung tenaga kerja yang menganggur akibat efisiensi yang dilakukan beberapa perusahaan. Pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi. Mengefisiensikan pengeluaran daerah untuk diefektifkan pada Belanja Modal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fundamental ekonomi daerah, sehingga daerah dapat terhindar dari dampak eksternal, misalnya krisis keuangan global.

- zation. *National Tax Journal*, 46(3), hal. 207-227.
- Bird, R. M., Ebel, R., & Wallich, C. (1995). *Decentralization of the socialist state: Intergovernmental finance in transition economics*. Washington DC: World Bank.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). *Fiscal decentralization in developing countries*. terjm. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono (2009). *Ekonomi Indonesia mau ke mana? (Kumpulan esai ekonomi)*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama dengan Freedom Institute.
- Fauzi, G. (2010). Paradigma kewenangan daerah yang efektif dan efisien. *Prisma*, 29(3), hal. 74-83.
- Gramlich, E. (1993). A policy maker's guide to fiscal decentralization. *National Tax Journal*, XLVI, hal. 229-235.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-dasar ekonometrika* (edisi ketiga), terjm. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2004). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah* (edisi revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hirawan, S. B. (2007). *Desentralisasi fiskal sebagai suatu upaya meningkatkan layanan publik (bagi orang miskin) di Indonesia*. Pidato pada upacara pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahi, R. (2001). Prospek desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi pemerataan antar daerah dan peningkatan efisiensi". *Analisa CSIS*, XXIX, hal. 54-66, Jakarta: Indonesia Project.
- Mankiw, N. G., (2007). *Makroekonomi* (edisi keenam), terjm. Jakarta: Erlangga.
- Martinez, V. J. M., & McNab, R. (2001). Fiscal decentralization, economic growth, and democratic governance. *Working Paper*.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(3), hal. 237-243.
- Parewangi, A. M. A. (2009). Dampak krisis global terhadap perekonomian daerah: aplikasi model computable general equilibrium di Maluku. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 11(4).
- Peterson, G. E. (1996). *Decentralization in Latin America: Learning through experience*. Washington DC: World bank.
- Phillips, K. L., & Woller, G. (1997). Does fiscal decentralization lead to economic growth? *Working Paper*.
- Prasmuko & Anugrah, D. F. (2010). Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 12(3).
- Prud'homme, R. (1995). On the danger of decentralization. *Working Paper*.
- Sasana, H. (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), hal. 103-124.
- Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi fiskal dan manajemen makroekonomi: urgensi suatu *grand design* di Indonesia. *Prisma*, 29(3), hal. 35-57.
- Soesilowati, E. S., ed., (2005). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat: Kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan*. Jakarta: Pusat Penelitian LIPI.
- Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertum-

- buhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), hal. 55-83.
- World Bank. (1997a). *The World development Report*. New York: Oxford University Press.
- World Bank. (1997b). *On line source book on decentralization and rural development*. Decentralization Thematic Team, SDA.
- Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67, hal. 221-240.
- Zhang, T., & Zou, H. (2001). The growth impact of intersectoral and inter-governmental allocation of public expenditure: With application in China and India. *China Economics*.